



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER/PENUGASAN *)
BIDANG / SUBBIDANG
TAHUN ANGGARAN

Provinsi : *[Diisi dengan Nama Provinsi]*
Kabupaten/Kota : *[Diisi dengan Nama Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Provinsi agar dikosongkan]*
Triwulan : *[Diisi dengan angka triwulan]*

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
					(Rp. Dalam ribuan)	Volume	(Rp. Dalam ribuan)	Volume	(Rp. Dalam ribuan)		(Rp. Dalam ribuan)	(%)	Volume	(%)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Sub Bidang														
	Tema														
	a.	Menu Kegiatan ...													
		1) Rincian Kegiatan ...													
		2) Rincian Kegiatan ...													
	b.	Menu Kegiatan ...													
		1) Rincian Kegiatan ...													
		2) Rincian Kegiatan ...													
	c.	Menu Kegiatan ...													



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

		1) Rincian Kegiatan ...																	
		2) Rincian Kegiatan ...																	
2.	Sub Bidang ...																		
	Tema																		
	a.	Menu Kegiatan ...																	
		1) Rincian Kegiatan ...																	
		2) Rincian Kegiatan ...																	
	b.	Menu Kegiatan ...																	
		1) Rincian Kegiatan ...																	
		2) Rincian Kegiatan ...																	
	c.	Menu Kegiatan ...																	
		1) Rincian Kegiatan ...																	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

		2) Rincian Kegiatan ...														
					TOTAL											

Tempat, tanggal
pelaporan

KEPALA DAERAH

Keterangan :

Kolom (1) : **No.** diisi Nomor Subbidang

Kolom (2) : **Subbidang/Kegiatan** diisi Nama Sub Bidang, Tematik, dengan rincian: Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan

Kolom (3) : **Volume Kegiatan** diisi besaran masing-masing rincian kegiatan

Kolom (4) : **Satuan Kegiatan** diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan

Kolom (5) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Kolom (5) : **Jumlah Penerima Manfaat** diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik
- Kolom (6) : **Pagu Alokasi DAK Fisik** diisi besaran alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang/tematik
- Kolom (7) : **Volume Kegiatan Swakelola** diisi besaran *output* masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (8) : **Nilai Dana Swakelola** diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (9) : **Volume Kegiatan Kontraktual** diisi besaran *output* masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (10) : **Nilai Dana Kontraktual** diisi besaran dana masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (11) : **Metode Pembayaran** diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
- Kolom (12) : **Realisasi Keuangan dalam Rupiah** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah
- Kolom (13) : **Realisasi Keuangan dalam Persentase** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase
- Kolom (14) : **Realisasi Fisik dalam Rupiah** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume *output*
- Kolom (15) : **Realisasi Fisik dalam Persentase** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase volume *output*

Kolom (16) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Kolom (16) : **Kodefikasi Permasalahan** diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah : *(diberi penjelasan)*

1. Permasalahan terkait dengan **Peraturan perundangan**
2. Permasalahan terkait dengan **Petunjuk Teknis**
3. Permasalahan terkait dengan **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD**
4. Permasalahan terkait dengan **DPA-SKPD**
5. Permasalahan terkait dengan **SK Penetapan Pelaksana kegiatan**
6. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak**
7. Permasalahan terkait dengan **Persiapan Pekerjaan Swakelola**
8. Permasalahan terkait dengan **Penerbitan SP2D**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

9. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak**
10. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola**
11. Permasalahan **Lain-lain**

***) coret yang tidak perlu**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditujukan kepada Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

SK No 053039 C